

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Pembangunan desa merupakan fokus utama pembangunan nasional karena desa adalah bagian wilayah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Pembangunan unit desa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan nasional. Desa juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan rencana-rencana pembangunan ekonomi yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha. Desa mandiri merupakan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat karena memiliki keinginan untuk maju, yang dapat dibuktikan dengan hasil karya dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan (Naily Rofidah, 2019). Pembangunan desa melalui sistem pemerintahan yang tertata akan memudahkan desa menuju desa yang mandiri. Pembangunan perekonomian daerah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Rokhim, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa dengan harapan untuk menjadi penyokong perekonomian desa (Widiastuti, 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang bisa memajukan perekonomian masyarakat di desa. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal

1 (6) Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable.

Di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bali sudah dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Perkembangan BUMDes di Bali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini dikarenakan oleh Pemerintah Provinsi Bali menargetkan untuk seluruh desa yang ada di Bali sudah memiliki BUMDes di tahun 2023. Di Kabupaten Buleleng sendiri BUMDes semakin berkembang di sejumlah desa sejak tahun 2014. Unit usaha pada BUMDes di desa-desa itu berbagai jenis, kebanyakan bergerak dalam usaha simpan pinjam. Selain itu, banyak BUMDes mengembangkan usaha pertokoan, pengelolaan air bersih, pasar tradisional hingga usaha peternakan. Dalam pengelolaan unit usaha pada BUMDes agar berjalan dengan lancar tanpa masalah tentunya harus didukung dengan adanya laporan keuangan yang dibuat dengan baik dan benar. Laporan keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Seperti badan usaha pada umumnya BUMDes wajib memberikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat (Swandika et al., 2023). Penyusunan laporan keuangan BUMDes tidak lepas dari Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2021 dan juga PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang disusun untuk kaidah-kaidah organisasi BUMDes. Laporan keuangan BUMDes secara detail diatur Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Peraturan ini menjelaskan jenis-jenis apa saja laporan keuangan yang wajib disusun BUMDes seperti laporan realisasi anggaran, proyeksi usaha, hingga laporan pendapatan dari unit usaha (Ruswandana, 2022). Laporan-laporan tersebut jika disusun dengan baik akan memudahkan pengurus BUMDes melakukan pertanggungjawaban dan membuat pihak ketiga melakukan pengawasan. Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari transaksi yang terjadi (Setyawan, 2018). Jika laporan keuangan bersih dan transparan maka tidak akan ada kecurigaan diantara pengurus BUMDes dan masyarakat desa. BUMDes harus dapat melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari setiap transaksi yang terjadi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Proses pencatatan dari laporan keuangan BUMDes yaitu dimulai dari transaksi yang terjadi di BUMDes dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Ruswandana, 2022). Secara umum laporan keuangan BUMDes tidak berbeda jauh dengan laporan lembaga lain. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan selama satu tahun periode. Laporan keuangan umumnya terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Terdapat kriteria dan unsur-unsur pembentukan kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan mempunyai

manfaat yaitu terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Sukriani et al., 2018).

Penelitian ini dilakukan pada pada BUMDes di se Kecamatan Busungbiu karena pada Kecamatan ini terdapat 13 BUMDes yang mana hanya 2 BUMDes yang berstatus maju, 6 BUMDes dengan status berkembang dan 5 BUMDes dengan status pemula (Putrawan, 2024). Status BUMDes yang masih dalam tahap perkembangan/berkembang karena terjadinya masalah dalam laporan keuangannya. Pendamping desa Kecamatan Busungbiu, Putu Wibawa Putrawan mengatakan bahwa BUMDes dengan status berkembang dikarenakan laporan keuangan yang dihasilkan belum tersaji dengan baik, sehingga kualitas laporan keuangan BUMDes masih rendah. BUMDes memang sudah menyusun laporan keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi, namun penempatan akun-akun yang ada masih belum sesuai dengan tempatnya. Seperti akun yang seharusnya terletak pada laporan necara tetapi dimasukkan dalam laporan laba rugi atau sebaliknya. Yang mana hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam analisis laporan keuangan. Selain itu, masih ada BUMDes yang menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan dengan bukti-bukti transaksi yang valid sehingga informasi yang diberikan tidak lengkap. Menyertakan bukti transaksi seperti faktur, kwitansi atau catatan transaksi lainnya tentu penting untuk mendukung keabsahan dan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tanpa bukti yang memadai laporan keuangan bisa jadi tidak dapat dipercaya dan rentan terhadap kesalahan atau manipulasi.

Beberapa BUMDes di Kecamatan Busungbiu juga telah memakai aplikasi dalam penyusunan laporan tetapi hal tersebut juga belum tentu pasti laporan

keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar karena individu yang membuat program harus mengetahui alur siklus akuntansi yang benar supaya hasil pada sistem juga benar. Terdapat pula BUMDes yang belum tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan keuangannya. Dimana penyajian laporan keuangan pada BUMDes yaitu setiap akhir tahun, namun kenyataannya masih terdapat BUMDes yang tidak menyajikan laporannya hingga akhir tahun tersebut. Diketahui penyebab dari kendala penyajian laporan keuangan tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi maupun standar pelaporan keuangan, kurangnya akses terhadap teknologi dan juga kurangnya pengawasan. Keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan ini tentu berlawanan dengan indikator kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang disajikan tepat waktu.

Tabel 1.1
Status BUMDes Kecamatan Busungbiu

No	Nama BUMDes	Unit Usaha	Status
1	BUMDes Sasana Artha	Dana bergulir masyarakat	Maju
2	BUMDes Wana sari	Simpan pinjam	Maju
3	BUMDes Padang Kerta	Simpan pinjam	Berkembang
4	BUMDes Amerta Jaya Paksi	Air bersih/PAM Desa	Berkembang
5	BUMDes Mandala Parahita	Simpan pinjam	Berkembang
6	BUMDes Ajeg Mandiri	Simpan pinjam	Berkembang
7	BUMDes Nadi Cemerlang	Simpan pinjam	Berkembang
8	BUMDes Widyasari	Air bersih/PAM Desa	Berkembang
9	BUMDes Sedana Yoga	Simpan pinjam	Pemula
10	BUMDes Suasti Padalyang	Air bersih/PAM Desa	Pemula
11	BUMDes Karsa Sejahtera	Pengelolaan hutan desa dan simpan pinjam	Pemula
12	BUMDes Sari Artha	Simpan pinjam	Pemula
13	BUMDes Rina Dana	Simpan pinjam	Pemula

Sumber : Data Inventarisasi Peningkatan BUMDesa Kec. Busungbiu 2024

Permasalahan yang terjadi pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu tidak hanya itu saja. Namun masih terdapat kasus penyelewengan dana BUMDes oleh pengurus BUMDes itu sendiri, sehingga BUMDes tersebut dapat beroperasi kembali. Kasus tersebut terjadi pada BUMDes Gemamatra desa Pucak Sari, yang mana diketahui BUMDes Gemamatra ini mendapat kucuran dana sebesar Rp1 milyar lebih dari Pemrov Bali, namun setelah berjalan kurang lebih 4 tahun ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan BUMDesnya. Tidak tanggung-tanggung ditemukan kerugian pada BUMDes mencapai ratusan juta rupiah, dimana di duga pengurus BUMDes telah membuat laporan fiktif pada pertanggungjawaban usaha di BUMDes tersebut (<https://beritadewata.com>). Diketahui BUMDes Pucak Sari memiliki dua unit usaha yakni Toko Serba dan Simpan Pinjam. Kedua unit usaha tersebut ditemukan adanya kerugian, dimana di Toko Serba mencapai Rp140 juta dan unit Simpan Pinjam mencapai Rp249 juta. Artikel tersebut sejalan dengan pernyataan Nyoman Dharma selaku Perbekel Desa Pucak Sari bahwa BUMDes Pucak Sari terdapat kejanggalan pada laporan pertanggung jawaban dalam laporan pengelolaan BUMDes tersebut. Dari laporan yang ada ia menemukan adanya adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta yang ada, yang mana banyak barang dagangan dalam usaha toko serba tidak jelas. Termasuk juga usaha simpan pinjam dan banyak kredit macet yang menimbulkan kecurigaan dari pihak desa.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan operasional perusahaan pada periode tertentu (Noviantari&Sumadi, 2023). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Stewardship* yang pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991). Teori ini mengasumsikan kesuksesan suatu organisasi

dapat dinilai dari kepuasan pemilik atas capaian yang telah dicapai oleh *steward* dalam menjalankan usaha. Hubungan teori *Stewardship* dengan penelitian ini adalah pengelola BUMDes selaku manajer mempunyai tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan serta memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Pengelola BUMDes wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan BUMDes dengan menyusun laporan keuangan yang berkualitas, dimana laporan tersebut akan memberikan informasi tentang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes yang nantinya akan dilaporkan ke desa. Dalam penyajian suatu laporan keuangan harus didasari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan kecurangan tersebut. Oleh sebab itu, informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakainya. Informasi tentu akan bermanfaat jika informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai. Dalam hal ini penting untuk memikirkan kualitas laporan keuangan jika ingin memberikan informasi keuangan yang akurat, dan berguna kepada pengguna laporan tersebut.

Penentuan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada observasi awal yang peneliti lakukan dimana ditemukan kendala pada penerapan sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan, dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikatakan langsung oleh pendamping desa Kecamatan Busungbiu yang mana hal ini akan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem informasi akuntansi. Penerapan sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai

alat kontrol yang menghasilkan informasi internal (Setyawan, 2018). Penerapan sistem informasi akuntansi dapat membantu menyusun dan mengolah data dengan cepat dan akurat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Noviantari&Sumadi, 2023). Pada kenyataannya masih sedikit BUMDes di Kecamatan Busungbiu yang menggunakan *softwere* dan *hardwere* penunjang penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan (Erawati&Tarigan, 2019) mendapat hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini harus disesuaikan dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara optimal dan sudah memiliki komputer yang cukup memadai dan karyawan yang bisa dalam menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut. Sistem informasi akuntansi disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. penelitian ini menolak penelitian (Setyawan, 2018) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain penerapan sistem informasi akuntansi pengawasan keuangan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengawasan keuangan merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan

yang akan dicapai (Randisa&Andriyan, 2022). Untuk memperoleh pengelolaan laporan keuangan yang berkualitas, pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah rencana telah disusun dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Namun pada kenyataannya pengawasan keuangan di BUMDes Kecamatan Busungbiu masih kurang stabil, sebab masih terdapat pihak yang memanfaatkan wewenangnya secara tidak sehat. Penelitian yang dilakukan (Kanjil&Sadeli, 2023) mendapatkan hasil yaitu pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin baik pengawasan keuangan yang dilakukan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Penelitian ini menolak penelitian (Arfianti, 2011) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia merupakan kekuatan pendorong di balik upaya organisasi atau lembaga tertentu untuk mencapai visi, misi dan tujuannya (Noviantari&Sumadi, 2023). Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam profesinya, khususnya di bidang akuntansi. Menyusun akun keuangan akan lebih sederhana jika seorang kompeten dalam bidang akuntansi. Namun permasalahan dilapangan menunjukkan bahwa kualitas para pengelola BUMDes di Kecamatan Busungbiu khususnya di bidang akuntansi masih rendah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum tersaji dengan baik. Penelitian yang dilakukan (Swandika et al., 2023) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya jika kualitas sumber daya manusia semakin

meningkat maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin meningkat. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan pengetahuan, skill, dan kemampuan untuk menentukan tingkat kinerjanya. Penelitian ini menolak hasil penelitian (Setyawan, 2018) yang menyatakan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor penerapan sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes se Kecamatan Busungbiu. Dengan mengeksplorasi keterkaitan faktor-faktor ini penelitian ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengawasan keuangan serta memberikan wawasan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pedoman praktis untuk pengurus BUMDes, sementara menyumbang pada literatur akuntansi dan kebijakan pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya Gap penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Keuangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BUMDes Se-Kecamatan Busungbiu”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat masalah mengenai laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu.
2. Pegawai BUMDes dalam penginputan data masih kurang memiliki akses terhadap teknologi dan sistem akuntansi yang canggih.
3. Terjadinya kecurangan di dalam laporan keuangan BUMDes karena kurangnya pengawasan yang baik dan memadai.
4. Kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dapat mengakibatkan berbagai masalah salah satunya lambatnya pertumbuhan BUMDes.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada penerapan sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu?
2. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu.
2. Pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu.
3. Kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bisa membetikan kontribusi bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ataupun mengembangkan lebih lanjut pemikiran da teori yang ada di bidang ilmu pengetahuan seperti dapat berbagi informasi mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Keuangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BUMDes Se-Kecamatan Busungbiu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Mampu menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan

Keuangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BUMDes Se-Kecamatan Busungbiu.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi, masukan, dan mampu berkontribusi pada pengetahuan dan menyalurkan ide untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi BUMDes

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada pengurus BUMDes mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Keuangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

